



Biogenerasi Vol 11 No 2, 2026
Biogenerasi: Jurnal Pendidikan Biologi
Universitas Cokroaminoto Palopo
<https://e-journal.my.id/biogenerasi>
e-ISSN 2579-7085

**ANALISIS PRINSIP BIOETIK DALAM PENANGANAN AWAL SATWA BURUNG
HASIL PENANGKAPAN DI PUSAT PENYELAMATAN SATWA TWA SIBOLANGIT**

*¹Alya Zakia Azzahra Nasution, ²Najwa Al Mukarromah, ³Mhd. Yusuf Nasution, ⁴Khairiza Lubis, ⁵Widya Arwita

¹²³⁴⁵, Program Studi Biologi, Universitas Negeri Medan., Indonesia

*Corresponding author E-mail: ¹alyazakiaazzahra05@gmail.com, ²najwaalmukarromah1@gmail.com,
³yusufnasution1963@gmail.com, ⁴khairizalubis@unimed.ac.id, ⁵widyaarwita@unimed.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.30605/bgnmgf69>

Accepted : 27 MArret 2026 Approved :9 April 2026 Published : 10 April 2026

Abstract

The capture of wild birds in Indonesia poses a significant threat to species conservation and animal welfare. Wildlife Conservation Centers (PPS) play a vital role in managing confiscated birds through a series of initial processes, including reception, health checks, and quarantine prior to rehabilitation. The aim of this study was to assess the implementation of bioethical principles in the initial handling of birds at the PPS and to assess its relationship to animal welfare. A descriptive qualitative approach was used through direct observation of bird reception at the Sibolangit PPS in January 2026. The study findings indicate that the handling process, including administrative recording, initial health checks, and placement in quarantine cages, was structured. Physical examinations and behavioral observations assisted officers in determining the condition of the birds and selecting appropriate handling methods. Bioethical principles such as benefit, non-harm, and fairness were also implemented, as evidenced by the provision of appropriate care, careful handling, and fair treatment of all birds. Overall, the initial handling at the PPS has contributed to improved animal welfare

Keywords : *bioethics, animal welfare, birds, animal protection center, initial handling*

menghadapi berbagai ancaman serius salah satunya akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali terhadap satwa liar. Burung merupakan salah satu kelompok satwa yang paling terdampak oleh aktivitas tersebut. Sebagai salah satu satwa yang mudah dilihat dan dinikmati suaranya, banyak jenis burung yang dicari untuk ditangkap dan dipelihara, kegiatan tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi penurunan jumlah jenis dan populasi burung di alam. Ada berbagai faktor yang menyebabkan terancamnya keanekaragaman burung di Indonesia, salah satunya adalah maraknya kegiatan perdagangan burung. Perdagangan satwa, termasuk burung merupakan faktor utama kepunahan spesies satwa serta penurunan jumlah spesies di Indonesia (Pratama & Satria, 2025).

Burung liar sangat takut dikurung atau berada dekat dengan apa yang mereka anggap sebagai predator berbahaya, misalnya manusia. Reaksi ekstrem yang terkait dengan rasa takut adalah salah satu alasan mengapa tingkat kematian burung yang diambil dari alam liar dan dimasukkan ke dalam sangkar sangat tinggi (Peng & Broom, 2021). Upaya penanganan terhadap satwa hasil tangkapan kemudian dilakukan melalui lembaga konservasi seperti Pusat Penyelamatan Satwa. Salah satu Pusat Penyelamatan Satwa di Sumatra Utara berada di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Bidang KSDA Wilayah I Kabanjahe Seksi Konservasi Wilayah II Stabat (CA/TWA Sibolangit). Salah satu program pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Utara berada di Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yaitu Taman Wisata Alam (TWA) Sibolangit (Ridlo, 2023).

Menurut Prayudhi (2015) pusat Penyelamatan Satwa (PPS) merupakan program hasil kerjasama Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan Republik Indonesia (Ditjen PHKA Dephut RI), dengan LSM baik lokal maupun nasional. Proses penanganan satwa hasil sitaan di PPS atau di PRS diantaranya : 1. Karantina satwa 2. Penilaian dan perlakuan medis: a). Anamnesis; b). Signalement; c). Pemeriksaan fisik-anatomis dan fisiologis; d). Pemeriksaan feses; e) Pemeriksaan darah; f) Diagnosis dan prognosis; g) Pengobatan; f) Rekomendasi medis untuk disposal. 3. Penilaian dan perlakuan perilaku: a). Penempatan kandang

isolasi, observasi, enclosure dan self-release; b). Pengamatan perilaku; c). Pelatihan; d) Rekomendasi perilaku untuk release. Kesejahteraan hewan adalah status fisik dan mental yang berhubungan dengan berbagai macam kondisi yang dialami oleh hewan. Hewan dikatakan sejahtera jika hewan tersebut sehat, aman, nyaman, mendapatkan gizi yang cukup, mampu mengekspresikan perilaku alamiah, dan hewan tidak menderita akibat keadaan yang tidak menyenangkan seperti nyeri, takut dan cemas (Aqilah *et al.*, 2020).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi, adapun standar minimum kesejahteraan satwa (1) bebas dari rasa lapar dan haus, (2) bebas dari ketidaknyamanan lingkungan, (3) bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit, (4) bebas dari rasa takut dan tertekan, (5) bebas untuk berperilaku alami. Satwa dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila satwa tersebut sehat, nyaman, terpelihara baik, aman, dan dapat mengekspresikan perilaku alami dan tidak menderita (Pudjirahaju *et al.*, 2024). Bioetika merupakan studi yang mengeksplorasi etika dalam konteks pelayanan kesehatan dan kehidupan dalam berbagai lingkungan. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etis pada situasi yang berkaitan dengan kehidupan dan kesehatan manusia, serta interaksi mereka dengan lingkungan biologis. Ada tiga prinsip etika yang harus diikuti, yaitu: menghormati kehidupan atau hewan (respect), menganalisis manfaat dan kerugian (beneficiary), serta menjamin keadilan (justice) (Sinaga *et al.*, 2024).

Penanganan awal untuk burung di Pusat Perlindungan Satwa mencakup pemeriksaan kesehatan, karantina, pemberian makanan, serta perlindungan dari ancaman fisik dan stres. Penanganan awal yang tepat tidak hanya penting untuk mempertahankan kesehatan burung dan juga memengaruhi keberhasilan rehabilitasi serta peluang mereka untuk kembali ke habitat alami. Untuk itu, sangat penting untuk menganalisis penerapan prinsip bioetika dalam penanganan awal burung hasil tangkapan di PPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas kebijakan serta standar operasional prosedur (SOP) dalam penerimaan burung dari sudut pandang bioetika, menganalisis penerapan

prinsip-benefisens, non-malefisens, dan keadilan dalam proses penerimaan burung di pusat perlindungan satwa, dan juga menilai penerapan prinsip bioetika selama tahap karantina burung untuk menghindari risiko penyebaran penyakit.

METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan mengevaluasi penerapan prinsip bioetika dalam penerimaan satwa baru di Pusat Perlindungan Satwa (PPS), serta menilai kesesuaian dengan standar kesejahteraan satwa. Penelitian ini dilaksanakan di pusat perlindungan satwa (PPS) yang berada di bawah pengelolaan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Bidang KSDA Wilayah I Kabanjahe Seksi Konservasi Wilayah II Stabat (CA/TWA Sibolangit). Penelitian ini dilaksanakan selama satu Minggu pada bulan Januari 2026. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat dua kali proses penerimaan satwa baru yang menjadi fokus pengamatan yaitu pada tanggal 17 Januari, dan 22 Januari 2026.

Fokus dari penelitian ini adalah proses penerimaan satwa baru, yang terdiri dari:

1. Pemeriksaan kesehatan awal
2. Penempatan di kandang baru PPS atau karantina

3. Proses administrasi dan dokumentasi
 Penelitian ini berfokus pada kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip bioetika dan kesejahteraan satwa.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung saat proses penerimaan satwa baru di Pusat Perlindungan Satwa (PPS), dengan peneliti mencatat secara runtut tahapan yang dilakukan petugas mulai dari pemeriksaan awal hingga penempatan satwa ke dalam kandang karantina, termasuk kondisi fisik dan respons perilaku satwa selama proses berlangsung. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi berupa checklist yang disusun berdasarkan tahapan penerimaan satwa untuk mencatat kesesuaian pelaksanaan di lapangan, buku catatan lapangan untuk mencatat kejadian penting atau temuan selama observasi, serta kamera yang digunakan untuk mengambil foto sebagai dokumentasi kondisi satwa dan lingkungan selama proses penerimaan. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil observasi selama penelitian berlangsung.

Teknik Analisis Data

Data di analisis secara deskriptif dengan membandingkan praktik penerimaan satwa di lapangan dengan prinsip bioetika, khususnya prinsip kesejahteraan satwa (*Five Freedoms*).

HASIL PENELITIAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian Tabel 1. Data Burung yang Masuk di Pusat Penyelamatan Satwa

No	Kelompok	Nama Lokal	Nama Latin	Jumlah	Tanggal Masuk
1.	Aves	Kakatua Jambul Kuning	<i>Cacatua sulphurea</i>	3	17 Januari 2026,
2.	Aves	Kakatua Seram/ Kakatua maluku	<i>Cacatua moluccensis</i>	1	17 Januari 2026,
3.	Aves	Kakatua Raja Hitam	<i>Probosciger aterrimus</i>	1	17 Januari 2026,
4.	Aves	Kasturi Raja	<i>Psittirichas fulgidus</i>	2	17 Januari 2026,
5.	Aves	Beo Biasa	<i>Gracula religiosa</i>	1	22 Januari 2026,

Penelitian ini dilakukan di Pusat Penyelamatan Satwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Bidang KSDA Wilayah I Kabanjahe Seksi Konservasi Wilayah II Stabat (CA/TWA Sibolangit), yang

berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi hewan hasil penyelamatan, penyerahan dari masyarakat, serta hasil tindakan hukum terkait perdagangan satwa liar. PPS merupakan salah satu lembaga instansi

pemerintah yang didirikan dari hasil kerja sama yang dikelola oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai tempat penampungan/perawatan/pemeliharaan dan penyelamatan berbagai jenis satwa liar hasil penertiban maupun serahan dari masyarakat. Satwa yang ditampung, dipelihara dan dirawat akan dinilai secara medis berdasarkan hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium. Satwa yang dinilai layak selanjutnya ditranslokasi untuk kepentingan konservasi baik dilepasliarkan maupun ditransfer ke pusat rehabilitasi atau lembaga konservasi yang ada di Indonesia (Ubaidillah *et al.*, 2023).

PPS ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan awal sebelum hewan tersebut menjalani proses rehabilitasi atau dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Hewan yang diterima umumnya melalui tahap pemeriksaan kesehatan awal, pencatatan administrasi, pemantauan kondisi fisik dan perilaku, serta proses penyesuaian sebelum mendapatkan perlakuan lebih lanjut. Beragam jenis hewan yang ditangani di pusat ini, termasuk burung, reptil, dan mamalia kecil, dengan fokus dari penelitian ini adalah pada burung yang baru saja diterima, baik yang diselamatkan dari perdagangan ilegal maupun yang diserahkan oleh masyarakat.

Tercatat ada sebanyak 1.771 jenis burung di dunia diketahui berada di Indonesia, bahkan 562 jenis di antaranya memiliki status dilindungi. Status ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yang terbit pada tanggal 29 Juni 2018. Peraturan tersebut mencantumkan jenis lain yang dilindungi selain jenis burung, yaitu mamalia, reptil, insekta, ikan, tumbuhan, dari krustasea, moluska dan xiphosura, serta amfibi. Penetapan jenis-jenis dilindungi ini, untuk mencegah tumbuhan dan satwa dari kepunahan akibat kerusakan habitat dan perdagangan yang tidak terkendali (Ubaidillah *et al.*, 2023).

PPS dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang, termasuk area karantina di klinik untuk penempatan sementara serta pemantauan kesehatan burung, dan ruang pemeriksaan di kantor PPS yang digunakan untuk evaluasi awal kondisi fisik, reaksi perilaku, dan penilaian kesehatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, burung akan dipindahkan ke

kandang karantina guna pemantauan lanjutan, demi memastikan kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit sebelum dilanjutkan dengan perawatan berikutnya.

Berdasarkan data yang disajikan pada (Tabel 4.1), tercatat sebanyak 8 ekor burung yang diterima di PPS selama penelitian pada bulan Januari 2026. Jenis burung yang diterima meliputi 3 ekor kakatua jambul kuning, 1 ekor kakatua seram, 1 ekor kakatua raja hitam, 2 ekor kasturi raja, dan 1 ekor burung beo biasa. Penerimaan burung tersebut terjadi pada tanggal yang berbeda selama periode penelitian.

Setiap burung yang masuk ke PPS melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan kesehatan awal, pencatatan administrasi, dan penempatan di kandang karantina. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan burung serta mencegah kemungkinan penularan penyakit ke satwa lain. Selain itu, masa karantina juga dimanfaatkan untuk memantau kondisi fisik dan perilaku burung sebelum dilakukan penanganan lanjutan.

Berdasarkan waktu penerimaan, burung tidak datang secara bersamaan, tetapi secara bertahap. Pada tanggal 17 Januari 2026, terdapat 7 ekor burung yang diterima sekaligus, terdiri dari 3 ekor kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), 1 ekor kakatua seram (*Cacatua moluccensis*), 1 ekor kakatua raja hitam (*Probosciger aterrimus*), dan 2 ekor kasturi raja (*Psitttrichas fulgidus*). Kemudian, pada tanggal 22 Januari 2026, terdapat tambahan 1 ekor burung beo biasa (*Gracula religiosa*) yang masuk ke PPS. Penerimaan burung selama penelitian berlangsung secara bertahap sesuai waktu penyerahan atau hasil penyelamatan.

Proses Penerimaan Burung di PPS

Proses penerimaan burung di Pusat Perlindungan Satwa (PPS) dilakukan melalui beberapa tahapan sebelum burung ditempatkan pada kandang perawatan atau rehabilitasi. Tahapan ini meliputi pencatatan administrasi, pemeriksaan kesehatan awal, serta penempatan burung pada kandang karantina atau kandang habituasi. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan kondisi burung yang baru datang sehingga dapat ditentukan penanganan yang sesuai sebelum dilakukan perawatan lebih lanjut.

Ketika burung pertama kali tiba di kantor PPS, petugas terlebih dahulu melakukan

proses pendataan administrasi. Pada tahap ini, petugas mencatat informasi mengenai jenis burung yang datang, jumlah individu, serta kondisi awal burung yang dapat diamati secara langsung, seperti kondisi fisik, tingkat keaktifan, maupun adanya tanda-tanda luka atau stres. Pendataan ini penting dilakukan agar setiap satwa yang masuk dapat terdokumentasi dengan baik dan memudahkan proses pemantauan selama burung berada di PPS.

Setelah proses pendataan selesai, burung kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan awal oleh dokter hewan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan burung secara lebih mendalam, seperti adanya penyakit, luka, atau gangguan fisik lainnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokter hewan dapat menentukan langkah penanganan yang tepat bagi setiap burung yang masuk.

Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan bahwa burung mengalami sakit atau memiliki kondisi fisik yang kurang baik, maka burung tersebut akan ditempatkan di kandang karantina yang berada di area klinik PPS. Penempatan di kandang karantina bertujuan agar kondisi burung dapat dipantau secara lebih intensif oleh keeper maupun dokter hewan. Selain itu, karantina juga dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit kepada burung lain yang berada di PPS.

Sementara itu, apabila burung yang datang berada dalam kondisi sehat, maka burung tersebut akan dipindahkan oleh keeper ke kandang habituasi. Kandang habituasi merupakan tempat bagi burung untuk beradaptasi dengan lingkungan baru sebelum menjalani tahap rehabilitasi lebih lanjut. Pada tahap ini, burung mulai menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan di PPS serta mendapatkan pakan yang sesuai dengan jenisnya.

Proses penerimaan satwa yang dilakukan di PPS ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa pengelolaan satwa di Pusat Penyelamatan Satwa melibatkan beberapa tahapan penting, seperti proses penerimaan satwa, pencatatan inventaris satwa, serta monitoring kesehatan untuk memastikan kondisi satwa selama berada dalam proses konservasi (Ubaidillah *et al.*, 2023). Dengan adanya tahapan tersebut, kondisi burung yang masuk ke PPS dapat dipantau dengan baik sehingga proses perawatan dan rehabilitasi

dapat dilakukan secara lebih optimal.

Pemeriksaan Kesehatan Awal Burung

Setiap burung yang diterima di PPS menjalani pemeriksaan kesehatan awal untuk mengevaluasi kondisi fisik dan kesejahteraan mereka sebelum diletakkan ke kandang karantina. Pemeriksaan fisik melibatkan pengamatan terhadap bulu, mata, paruh, kaki, dan cakar untuk memastikan bahwa hewan tersebut sehat dan tidak mengalami cedera. Keadaan bulu menjadi indikator utama dari kesejahteraan, karena bulu yang tampak rusak, rontok, atau tidak terawat bisa menjadi indikasi dari Feather Damaging Behavior (FDB), yaitu perilaku yang terjadi akibat stres, ketidaknyamanan, atau kekurangan stimulasi di lingkungan. Sebaliknya, burung yang memiliki bulu terawat dan utuh menunjukkan tingkat kenyamanan yang lebih baik serta kemampuan untuk mengekspresikan perilaku alami mereka dengan baik.

Perilaku merusak bulu (FDB) meliputi mencabut, mengunyah, mengurai, dan/atau menggigit, dan mengakibatkan hilangnya atau kerusakan bulu. Sesuai dengan penelitian Costa *et al* (2016) yang menyatakan bahwa perbedaan yang mencolok dalam prevalensi FDB pada dua populasi burung beo yang berbeda. Populasi yang dibesarkan oleh induknya menunjukkan prevalensi FDB sebesar 1,3%, sedangkan populasi burung beo peliharaan menunjukkan prevalensi FDB sebesar 17,5%. Grindlinger (1991) memperkirakan bahwa sekitar 10% dari populasi burung yang dipelihara menderita FDB. FDB jarang diamati di alam liar dan biasanya terjadi pada burung yang dipelihara di penangkaran ketika mereka mencapai kematangan seksual, meskipun beberapa penulis telah melaporkan timbulnya FDB sebelum terjadinya kematangan seksual. FDB terjadi pada banyak spesies burung beo, dan telah diamati pada burung beo abu-abu Afrika (*Psittacus erithacus*) dan Burung kakatua (*Cacatua spp*).

Tidak hanya fisik, observasi perilaku juga dilakukan untuk menilai tingkat stres, agresivitas, dan cara burung menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Beberapa burung menunjukkan perilaku yang berbeda atau tanda-tanda kegelisahan ringan, sedangkan yang lainnya cepat beradaptasi dengan kandang. Observasi ini krusial untuk menentukan langkah-langkah pengelolaan

selama masa karantina, termasuk pengayaan lingkungan atau interaksi yang terbatas agar burung dapat bergerak, makan, dan beristirahat dengan aman dan nyaman.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menegaskan bahwa burung dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun perilaku, serta untuk menentukan jenis perawatan yang tepat sebelum mereka ditempatkan bersama hewan lainnya. Pemantauan kondisi bulu dan perilaku sejak tahap awal memungkinkan petugas untuk mendeteksi tanda-tanda FDB dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mendukung kesejahteraan burung selama proses karantina.

Proses Karantina Burung

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan awal, burung yang baru diterima akan ditempatkan di kandang karantina. Tahap karantina merupakan salah satu prosedur penting dalam pengelolaan satwa di Pusat Perlindungan Satwa (PPS). Karantina dilakukan untuk memastikan bahwa burung yang baru datang tidak membawa penyakit yang dapat menular kepada satwa lain yang sudah berada di fasilitas tersebut. Dengan adanya proses karantina, kondisi kesehatan burung dapat dipantau terlebih dahulu sebelum burung dipindahkan ke tahap penanganan selanjutnya.

Selama masa karantina, burung akan dipantau secara rutin oleh keeper maupun tenaga medis yang bertugas. Pemantauan ini meliputi pemberian pakan dan air minum yang sesuai dengan jenis burung, serta pengamatan terhadap kondisi fisik dan perilaku burung. Keeper juga memperhatikan aktivitas burung di dalam kandang, seperti tingkat keaktifan, respons terhadap pakan, serta tanda-tanda stres atau penyakit yang mungkin muncul. Apabila selama masa karantina ditemukan burung yang menunjukkan gejala sakit, maka burung tersebut akan mendapatkan penanganan lebih lanjut oleh dokter hewan.

Selain pemantauan kesehatan, tahap karantina juga berfungsi sebagai masa adaptasi awal bagi burung terhadap lingkungan barunya. Burung yang baru masuk ke PPS umumnya berasal dari hasil sitaan, penyerahan masyarakat, atau penangkapan dari alam sehingga sering mengalami stres akibat proses penangkapan dan perubahan lingkungan. Oleh karena itu, penempatan di kandang karantina dilakukan untuk memberikan waktu bagi

burung agar dapat menyesuaikan diri secara bertahap dengan kondisi lingkungan di PPS sebelum dipindahkan ke kandang habituasi atau tahap rehabilitasi lainnya.

Tahapan karantina ini sangat penting karena dapat membantu menjaga kesehatan satwa secara keseluruhan di dalam fasilitas konservasi. Melalui proses pemantauan yang dilakukan secara rutin, kondisi burung dapat diketahui sejak awal sehingga tindakan penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan gangguan kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menyebutkan bahwa dalam pengelolaan burung diperlukan pengawasan kesehatan dan tindakan karantina untuk memastikan kondisi satwa tetap sehat serta mencegah penyebaran penyakit pada burung lainnya (Wahyuni *et al.*, 2022).

Penerapan Prinsip Bioetik

Dalam proses penanganan satwa burung yang masuk ke Pusat Perlindungan Satwa (PPS), penerapan prinsip bioetik sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini karena burung yang masuk ke PPS umumnya merupakan hasil sitaan atau penangkapan dari alam liar, sehingga sering berada dalam kondisi stres, kelelahan, atau bahkan mengalami luka. Oleh karena itu, penerapan prinsip bioetik diperlukan agar proses penanganan satwa dapat dilakukan secara etis serta dapat meminimalkan penderitaan yang dialami oleh burung. Prinsip bioetik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beneficence, non-maleficence, dan justice.

Prinsip beneficence berarti memberikan manfaat atau tindakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hewan. Pada PPS yang menjadi lokasi penelitian, penerapan prinsip ini sudah terlihat dalam proses penanganan satwa yang masuk. Ketika burung tiba di PPS, burung tidak langsung dimasukkan ke dalam kandang, tetapi terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh dokter hewan untuk mengetahui kondisi fisik burung tersebut. Setelah pemeriksaan awal, burung ditempatkan di kandang karantina sebelum dipindahkan ke kandang habituasi. Selama masa karantina, burung diberikan pakan yang sesuai dengan jenisnya. Selain itu, apabila terdapat burung yang sakit, burung tersebut akan mendapatkan perawatan medis yang layak dari dokter hewan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk memberikan manfaat serta meningkatkan kondisi kesehatan

satwa yang dirawat di PPS.

Prinsip non-maleficence berkaitan dengan upaya untuk tidak menimbulkan kerugian atau penderitaan pada satwa. Penerapan prinsip ini dapat dilihat dari cara petugas dalam menangani dan memindahkan burung ke kandang karantina. Berdasarkan hasil pengamatan, petugas menggunakan sarung tangan saat memindahkan burung dan melakukannya dengan cara yang lembut serta berhati-hati. Hal ini dilakukan untuk menghindari cedera pada burung maupun petugas. Burung hasil sitaan biasanya berada dalam kondisi stres sehingga sering menunjukkan perilaku defensif, seperti mematak tangan manusia yang mencoba memindahkannya. Oleh karena itu, penanganan yang hati-hati sangat diperlukan agar burung tidak mengalami stres yang lebih berat. Tindakan ini sejalan dengan konsep etika perlindungan hewan yang menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk menghindari tindakan yang dapat menyebabkan penderitaan pada hewan (Satya & Mahendrayana, 2023).

Prinsip justice berkaitan dengan keadilan dalam memberikan perlakuan terhadap satwa. Dalam proses penanganan di PPS, semua burung yang diterima mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis maupun nilai ekonominya. Setiap burung memperoleh pakan yang layak dengan porsi yang disesuaikan dengan jenisnya, serta mendapatkan penanganan yang sama apabila mengalami sakit.

Selain itu, burung juga ditempatkan pada kandang yang memadai untuk menunjang kesejahteraan satwa selama berada di PPS. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan dalam proses penanganan satwa burung di PPS.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, proses penerimaan burung di Pusat Perlindungan Satwa (PPS) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencatatan administrasi, pemeriksaan kesehatan awal, dan penempatan di kandang karantina untuk memantau kondisi kesehatan serta mencegah penyebaran penyakit. Pemeriksaan fisik dan observasi perilaku membantu petugas mengetahui kondisi burung serta menentukan penanganan yang tepat. Selain itu, penanganan burung di PPS telah menerapkan prinsip bioetik seperti

beneficence, non-maleficence, dan justice, yang terlihat dari pemberian perawatan kesehatan, penanganan yang hati-hati untuk menghindari cedera, serta perlakuan yang sama terhadap semua burung. Dengan demikian, proses penanganan awal burung di PPS secara umum telah sesuai dengan prinsip bioetik dan standar kesejahteraan hewan.

Disarankan agar PPS meningkatkan fasilitas karantina dan menyediakan pengayaan lingkungan untuk mengurangi stres burung. Selain itu, perlu dilakukan monitoring perilaku yang lebih terstruktur serta evaluasi SOP secara berkala. Peningkatan kemampuan petugas melalui pelatihan juga penting agar penanganan satwa lebih optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Costa, P., Macchi, E., Valle, E., De Marco, M., Nucera, D. M., Gasco, L., & Schiavone, A. (2016). An association between feather damaging behavior and corticosterone metabolite excretion in captive African grey parrots (*Psittacus erithacus*). *PeerJ*, 4, 1-10.
- Peng, S., & Broom, D. M. (2021). The Sustainability of Keeping Birds as Pets: Should Any be Kept?. *Animals*, 11(2), 582.
- Pratama, M. A. & Satria, R. (2025). Keanekaragaman Jenis Burung di Indonesia: Kasus Perdagangan dan Ancaman di Masa yang Akan Datang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13210-13219
- Prayudhi, R. T. (2015). Penegakan Hukum, Rehabilitasi dan Pelepasliaran Satwa Dilindungi Hasil Sitaan Negara Ujung Tombak Upaya Penstabilan Ekosistem Kawasan Konservasi. *Open Journal System*, 4(5), 19-29.
- Pudjirahaju, A., Sujoko, H., & Ma'rifah, S. (2024). Evaluation of Management and Welfare Level of Sambar Deer in Palangka Raya Captivity. *Buletin Veteriner Udayana*, 16(6), 1563-1574.
- Ridlo, M. A. (2023). Urgensi pelibatan dan partisipasi pemuda dalam upaya pengembangan pariwisata Taman Wisata Alam Sibolangit. *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, 1(2), 122-138.
<https://doi.org/10.59581/jmpp-widyakar ya.v1i2.906>

- Satya, I. G. S. R., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2023). Perlindungan Menurut Kesejahteraan Hewan Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(4), 782-770
- Sinaga, Z., Sihotang, N. R., Fadhilah, N., & Haniyyah, U. (2024). Bioetika Perawatan dan Pemanfaatan Hewan pada Pengujian MIT (Mouse Inoculation Test) Deteksi Virus Rabies. *Jurnal Sains dan Teknologi Industri Peternakan*, 4(2), 65-70.
- Ubaidillah, H., Eosina, P., & Primasari, D. (2023). Sistem informasi monitoring konservasi satwa pada Pusat Penyelamatan Satwa berbasis web. *Krea-TIF: Jurnal Teknik Informatika*, 11(1), 14–22
- Wahyuni, D. S., Latif, H., Sudarwanto, M. B., & Basri, C. (2022). Pola pemeliharaan burung walet pada pulau-pulau utama penghasil sarang burung walet di Indonesia. *Jurnal Sains Veteriner*, 40(2), 117–127